

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perempuan sering dipandang sebagai individu yang memiliki kelemahan, keterbatasan, cenderung emosional, dan kurang rasional (Israpil, 2017). Akibatnya, mereka dianggap tidak cocok untuk bekerja di sektor publik yang dianggap “keras”, kompetitif, dan membutuhkan rasionalitas. Perempuan yang memilih bekerja, membangun karir, dan bersaing dengan laki-laki dianggap melanggar kodrat mereka. Di sisi lain, laki-laki dipandang dan ditempatkan dalam peran produktif, yakni sebagai pencari nafkah di ranah publik. Sebagai pencari nafkah, mereka dianggap memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan rumah tangga.

Sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, laki-laki memegang peran sebagai bapak dalam keluarga, yang juga ditempatkan sebagai figur otoritas dalam keluarga. Hubungan dan komunikasi dalam keluarga sering kali bersifat hierarkis, di mana bapak berperan sebagai penguasa yang tidak hanya memimpin keluarga, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan yang mendominasi. Dalam situasi ini, perempuan sering kali ditempatkan sebagai individu dengan kedudukan yang lebih rendah, dianggap sebagai manusia kelas dua dalam keluarga (Palulungan et al., 2020)

Permasalahan kebebasan sering kali dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Di satu sisi, manusia memiliki keinginan kuat untuk menentukan setiap keputusan dan tindakan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Namun, di sisi lain, mereka juga sadar bahwa ada banyak aspek dalam kehidupan yang tidak bisa ditolak atau diubah, seperti jenis kelamin dan hal-hal lain yang melekat sejak lahir, yang seringkali dialami oleh para perempuan. Meskipun demikian, perempuan dengan akal budi dan hasrat akan kebebasan tetap memiliki potensi untuk mengubah ketentuan yang seolah-olah sudah ditetapkan tersebut. Terlebih lagi, penindasan yang terjadi berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan betapa perempuan seringkali menjadi objek ketidakadilan oleh laki-laki, meskipun mereka juga memiliki kemampuan untuk melawan dan mengubah situasi tersebut (Azizah *et al.*, 2022).

Penindasan adalah proses, cara, atau perbuatan dengan memperlakukan dengan sewenang-wenang, menguasai dengan paksa. Penindasan merupakan bentuk perilaku yang melibatkan penggunaan kekuasaan atau dominasi untuk menekan, mengontrol, atau merugikan individu atau kelompok lain. Penindasan termasuk tindakan agresif ketika pelaku secara sengaja menyakiti atau membuat korban merasa tidak nyaman secara berulang. Bentuk penindasan dapat mencakup kontak fisik, verbal, ataupun perilaku, seperti ejekan, penyebaran lelucon, intimidasi, dan sebagainya (Erlina *et al.*, 2023). Penindasan terhadap perempuan menjadi masalah yang mendalam dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Penindasan ini sering kali berakar pada struktur sosial yang patriarki, di mana norma-norma budaya dan sistem kekuasaan cenderung mengutamakan laki-laki dan merendahkan perempuan.

Marion Young, salah satu tokoh feminisme yang berpengaruh mengatakan bahwa penindasan adalah segala macam upaya untuk membatasi atau hambatan agar individu tidak bisa mengekspresikan dirinya. Menurutnya ada 5 wajah dari penindasan, yaitu eksploitasi, marjinalisasi, ketidakberdayaan, imperialisme kultural, dan kekerasan. Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan membuat banyak perempuan mengalami ketidakadilan dan hidup dalam kondisi yang sulit, dimana perempuan sering kali mengalami penurunan status sosial, terbatasnya akses terhadap sumber daya, dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Sebagaimana ungkapan Marwinda & Margono (2020), penindasan terhadap perempuan muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan domestik, pelecehan seksual, ketidaksetaraan dalam pekerjaan dan pendidikan, serta kekerasan nonfisik, seperti perkataan kasar, merendahkan, hingga pengekangan. Penindasan pada perempuan mencakup kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik.

Kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kekerasan non-fisik terbagi menjadi kekerasan verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal muncul seperti tekanan pada perempuan, *catcalling*, perkataan kasar, maupun perkataan yang merendahkan perempuan. Sedangkan kekerasan non-verbal berupa tatapan sinis, ekspresi merendahkan, hingga gerakan ancaman pada perempuan (Permata & Nasution, 2022). Penindasan ini mempengaruhi emosional perempuan, yang membuat mereka merasa tertekan hingga mengalami trauma. Banyak perempuan juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak dasar seperti

pendidikan, kesehatan, dan keamanan pribadi, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Hal ini menjadi suatu masalah penting dalam pandangan feminisme (Marwinda, 2019).

Penindasan terhadap perempuan banyak terjadi di Indonesia. Data Komnas Perempuan pada tahun 2022 memaparkan meskipun jumlah total pengaduan kasus sedikit menurun menjadi 457.895 dari 459.094 kasus, pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4.371 kasus, dengan rata-rata 17 kasus per hari. Dari total pengaduan, 339.782 kasus termasuk kekerasan berbasis gender (KBG), dengan 3.442 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal mendominasi dengan 99% atau 336.804 kasus, sedangkan di ranah publik ada 2.978 kasus, dengan 1.276 di antaranya dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kasus kekerasan di ranah negara meningkat menjadi 68 kasus pada 2022 (Komnas Perempuan, 2023).

Data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus atau 38,21%), diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus atau 35,72%). Sebaliknya, lembaga layanan lebih banyak melaporkan kekerasan fisik (6.001 kasus atau 38,8%) dan kekerasan seksual (4.102 kasus atau 26,52%). Data ini menyoroti perlunya perhatian pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan efektivitas perlindungan korban. Data ini menunjukkan dominasi kekerasan seksual dan psikis dalam pengaduan Komnas Perempuan, sementara lembaga layanan lebih banyak melaporkan kekerasan fisik (Komnas Perempuan, 2023). Perempuan awalnya tidak memiliki akses pada ruang publik akibat adanya pembatasan bagi perempuan untuk bekerja di sektor domestik. Namun, ketika perempuan berhasil berpartisipasi pada ruang publik, penindasan tersebut tetap terjadi.

Buku Teorisasi Patriarki karya Sylvia (2014) menyebutkan bahwa perempuan dihadapkan pada bentuk penindasan yang lebih luas dalam ruang publik, yaitu struktur sosial patriarkis. Laki-laki di ruang publik tidak langsung memberikan kebebasan bagi perempuan untuk bergerak sesuai keinginan mereka. Laki-laki berusaha untuk mempertahankan dominasi mereka terhadap perempuan. Penindasan terhadap perempuan di ruang publik dipaparkan dalam catatan Komnas Perempuan (2023), di mana terdapat 1.634 kasus yang terjadi di ranah publik, termasuk 498 kasus kekerasan di tempat umum, 355 kasus kekerasan di dunia pendidikan, 353 kasus kekerasan di tempat tinggal, 93 kasus

kekerasan di tempat kerja, 79 kasus kekerasan di ranah siber, satu kasus kekerasan di fasilitas medis, serta 255 kasus kekerasan lainnya. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik.

Data berasal dari survei *International Labour Organization* (ILO) di tahun 2023 menunjukkan bahwa kekerasan pada dunia kerja di Indonesia cukup genting. Di mana dari 1.173 responden, 70,93% di antaranya melaporkan pernah mengalami penindasan di tempat kerja. Tren yang masih berlanjut dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa korban kekerasan di tempat kerja didominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 55,92% (656 orang). Data Komnas Perempuan di tahun 2022 mengungkap sejumlah 69,35% pekerja mengalami lebih dari satu jenis kekerasan, dengan 77,40% mengalami kekerasan psikologis dan 50,48% mengalami kekerasan seksual. Banyak korban mengalami gangguan mental dan memilih bunyam karena minimnya perlindungan (Sukmana, 2023).

Data lain dari CNN Indonesia (2024) memaparkan sebesar 49% dari 901 responden perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Perilaku *cat-calling* menjadi salah satu bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh karyawan perempuan. Sebanyak 76 persen responden mengaku pernah mendapatkan *cat-calling* berbau seksual, dengan bagian tubuh tertentu menjadi perhatian dan disertai gestur seksual. Perempuan lebih banyak mengalami *cat-calling*, dengan 83 persen responden perempuan melaporkan menerima godaan, candaan, dan siulan di tempat kerja. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 10 persen responden pernah diancam untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan 3 persen menjadi korban percobaan pemerkosaan.

Feminisme terlahir dari kesadaran perempuan atas tindakan penindasan serta eksploitasi laki-laki (Satritama & Ahmadi, 2023). Feminisme merupakan pandangan yang melihat bahwa masyarakat, lingkungan kerja, dan keluarga secara keseluruhan berperan dalam menindas dan mengeksploitasi perempuan. Istilah feminisme sebenarnya merujuk pada kesadaran akan ketidakadilan sistematis yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Feminisme juga dipahami sebagai upaya untuk menciptakan relasi sosial yang adil, setara, dan berlandaskan keadilan. Selama ini, konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat cenderung menempatkan perempuan sebagai “pihak kedua” (Pondaag *et al.*, 2017).

Selain itu, feminisme termasuk usaha yang dilakukan secara sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut (Pratama *et al.*, 2024). Feminisme Marxis melihat isu perempuan melalui lensa kritik kapitalisme, dengan asumsi bahwa penindasan perempuan berakar dari eksploitasi kelas dan metode produksi. Mereka menolak pandangan radikal yang menganggap “biologi” sebagai dasar perbedaan gender dan berargumen bahwa penindasan perempuan merupakan bagian dari eksploitasi kelas dalam “relasi reproduksi”. Masalah perempuan selalu dianalisis dalam konteks kritik terhadap kapitalisme, meskipun bentuk-bentuk penindasan ini sudah ada sejak sebelum era kapitalisme (Abbas, 2020).

Fenomena penindasan perempuan sudah berlangsung sejak lama, seperti pada tahun 1960-an. Sebagaimana kajian Suaka (2021) terkait novel berjudul “Gadis Pantai” ciptaan Pramudya Ananta Toer, yang menceritakan terkait penindasan yang diterima oleh masyarakat di kampung nelayan daerah Rembang. Salah satu bentuk penindasan itu seperti para gadis yang diambil paksa untuk dijadikan selir dan sebagai pemuas nafsu. Selain itu, mereka harus menuruti segala keinginan Bendoro. Apabila para gadis melahirkan anak perempuan, mereka akan diceraikan oleh suaminya (bendoro) dan dipulangkan kepada orang tuanya dengan uang pesangon. Anak tersebut tidak boleh diakui oleh ibunya, karena sudah menjadi hak penuh dari keluarga Bendoro.

Penindasan terhadap perempuan diakibatkan oleh persepsi yang terbentuk dalam masyarakat yang membuat perempuan menjadi bagian dari objek untuk reproduksi saja. Karena dianggap memiliki peran reproduktif, perempuan dinilai hanya layak berada di rumah untuk melahirkan serta merawat anak-anak. Lebih parahnya lagi, perempuan yang berada di rumah juga diharapkan mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga yang dikategorikan sebagai pekerjaan domestik, yang secara stereotip hanya boleh dilakukan oleh perempuan (Palulungan *et al.*, 2020). Melahirkan dan menyusui sebagai bagian dari fungsi reproduksi perempuan merupakan sesuatu yang alami atau kodrati. Namun, fungsi alami ini sering disamakan dengan tugas-tugas domestik di rumah. Akibatnya, pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab perempuan dan dipandang sebagai kewajiban mereka, seolah-olah sama pentingnya dengan peran reproduktif mereka (Israpil, 2017).

Salah satu persepsi masyarakat terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh film, yang berfungsi sebagai representasi masyarakat. Film dipercaya selalu dapat memproyeksikan realitas dan menunjukkannya keatas layar kaca yang dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat (Kaukab & Hidayah, 2020). Pada satu sisi, film juga digunakan sebagai sarana untuk mengajarkan masyarakat bahwasanya masalah gender adalah masalah penting karena penindasan dan ketidakadilan gender masih terjadi di dunia saat ini. Tema gender muncul dalam perfilman karena ada "ketidakseimbangan" antara peran laki-laki dan perempuan (Ayomi, 2021). Film tidak hanya menunjukkan ketidakseimbangan gender tetapi juga dapat membantu orang menjadi lebih sadar dan memberikan perubahan sikap. Dalam film, realitas sosial digambarkan sebagaitanda teks yang mencakup berbagai tindakan yang terjadi di dunia nyata yang didasarkan pada struktur sosial dan dibuat oleh individu.

Keterlibatan perempuan telah memungkinkan cerita-cerita yang lebih beragam dan memberikan sudut pandang yang unik dan mendalam dalam karya film yang diproduksi. Di Indonesia juga telah banyak dilakukan penelitian tentang representasi perempuan. Listyani *et al.* (2021) mengatakan bahwa penelitian tentang representasi selalu terkait dengan pembentukan ulang sosial yang dibuat oleh kesadaran manusia. Karena manusia senantiasa menerima dan mengirimkan simbol-simbol dalam proses komunikasi, manusia selalu melakukan rekonstruksi sosial atas berbagai simbol-simbol ini. Representasi yang diperoleh dari film sangat membentuk pola pikir masyarakat. Stuart hall beranggapan bahwa representasi adalah perwakilan penting dari budaya dan praktiknya, dan mereka dapat menghubungkan arti dan bahasa kebudayaan.

Indonesia sudah mmulai mengangkat tema film-film yang membahas mengenai isu-isu gender, seperti Yuni (2021) dan Kartini (2017). Yuni (Arawinda Kirana) adalah seorang siswi SMA yang terkenal di sekolah karena kecerdasannya. Remaja ini memiliki keinginan besar untuk pergi ke perguruan tinggi. Meskipun Yunimenghadapi banyak tantangan saat berusaha mewujudkan impiantersebut. Ia dihadapkan pada tekanan untuk segera menikah setelah menyelesaikan sekolah menengah karena ia dibesarkan di lingkungan dengan norma- norma konvensional. Namun, Yuni tidak goyah dan terus berusaha untuk mencapai tujuannya. Meskipun dia dihadapkan pada dua lamaran dari orang yang tidak dikenal, Yuni tetap menolaknya. Keputusannya menyebabkan gosip

bahwa seorang wanita tidak akan pernah menikah jika dia menolak tiga lamaran.

Selanjutnya ada film *Kartini* (2017), yang menceritakan kisah hidup Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena memimpin perjuangan untuk emansipasi wanita dan pendidikan bagi perempuan pada awal abad ke-20. Meskipun film ini bertujuan untuk mengangkat tokoh inspiratif seperti Kartini, beberapa kritikus mengkritiknya karena penggambaran situasi dan karakternya yang stereotip. Salah satu stereotip yang mungkin muncul adalah penekanan pada peran perempuan konvensional, di mana Kartini digambarkan sebagai seorang yang patuh dan tunduk terhadap norma masyarakat zamannya.

Berdasarkan penelitian penulis, penulis juga mencari penelitian-penelitian yang memiliki tema serupa dengan tema yang peneliti pilih. Penelitian berjudul *Stereotip Dan Rasisme Pada Ras Kulit Hitam (Analisis Framing Dalam Film The Hate U Give)* oleh Agasta & Hidayat (2023). Meskipun fokus penelitian terlebih kepada rasisme pada ras kulit hitam, penelitian ini juga membahas mengenai stereotipe dengan menggunakan analisis framing. Film tersebut menampilkan interaksi antara dua kelompok etnis yang berbeda serta perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi yang dialami oleh komunitas kulit hitam. Film ini menceritakan tentang hal-hal seperti pendidikan awal tentang berurusan dengan ras kulit putih, keterlibatan dalam perdagangan narkoba, dan tindakan diskriminatif polisi kulit putih.

Selanjutnya ada penelitian yang berjudul *Analisis Framing Pesan Moral Film Get Married* yang diteliti oleh Yuyu Rulia Syarof pada tahun 2008. Meskipun penelitian ini berfokus pada pesan moral yang didapatkan dari film, tetapi metode analisisnya menggunakan analisis framing yang dimana sama dengan metode analisis penulis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa inidengan menggunakan analisis framing bisa menemukan pesan-pesan yang mengandung unsur kebaikan dengan menggunakan 4 tahapan analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Representasi Penindasan Perempuan dalam Novel Syurfatul Hawiyah Karya Ibrahim Nasrullah (Sebuah Tinjauan Feminisme Sastra)* karya Noor Amalia Fauzia Ali tahun 2023 juga dijadikan sebagai referensi oleh penulis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan, antara lain: 1) Perempuan menganggap bahwa

pernikahan merupakan bentuk penindasan dan sebagai sesuatu yang menakutkan karena mereka tidak memiliki kebebasan sesuai dengan keinginan mereka dan hanya dijadikan budak seksualitas laki-laki. 2) Dinamika kekuasaan hirarkis memfasilitasi pelecehan seksual, di mana pihak yang memiliki otoritas memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual terhadap bawahannya. Penelitian ini berfokus untuk memaparkan realita terkait kehidupan tokoh perempuan dalam novel Syurfatul Hawiyah melalui pendekatan feminisme sastra, yang membedakannya dengan penelitian penulis. Penulis melalui pendekatan framing mencoba untuk menemukan bentuk-bentuk penindasan yang dialami perempuan dalam film Gadis Kretek 2023.

Pada film yang akan diteliti ini, mengandung unsur penindasan yang dialami oleh ka karakter Dasiyah sebagai perempuan dalam film Gadis Kretek yang rilis pada pengunjung tahun 2023. Film karya Kamila Andini ini kembali menyita perhatian masyarakat, pasalnya film ini juga mulai mengangkat perempuan untuk di jadikan tokoh utama yang bukan hanya sebagai pendamping kisah percintaan pada film. Penggambaran gender dalam film Gadis Kretek ini berbeda dengan film – film yang mengusung tema film pada zaman dahulu lainnya yang membuat peneliti ingin menjadikan sebagai objek penelitian. Pasalnya film Gadis Kretek ini mengangkat latar pada tahun 1960-an, yang dimana khususnya perempuan dalam budaya Jawa harus selalu tunduk atas norma yang berlaku luas di masyarakat.



**Gambar 1.1**  
**Poster Film Gadis Kretek**



**Sumber : Google**

Diceritakan Dasiyah adalah seorang anak pengusaha rokok kretek di Kota M yang sangat terkenal pada saat itu. Dipercayai bahwa pada zaman dahuluperempuan hanya boleh menjadi “pelinting” saja, pelinting adalah orang yang bertugas untuk membungkus rokok. Pada zaman itu, perempuan sama sekali tidak boleh untuk menjadi peracik isi dari rokok. Dasiyah berusaha agar pandangan orang-orang dapat berubah terhadap dirinya. Ia menggambarkan bahwa perempuan juga bisa untuk meracik tembakau dengan handal.

Mengutip dari Forbes.com, Gadis Kretek, merupakan film terbaru Netflix Indonesia yang ambisius tentang industri cengkeh Indonesia. Dengan lebih dari 274 penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Sebagai pasar konten video terbesar di Asia Tenggara, investasi konten Indonesia akan meningkat 13% menjadi \$979 juta pada tahun 2022, menurut laporan Media Partners Asia. Saat diluncurkan pertama kali pada tanggal 2 November 2023, serial Gadis Kretek ini mendapatkan gelar Top 10 dengan penonton terbanyak untuk kategori non nggris hanya dalam tenggat waktu 2 minggu dengan total penonton 16.8 juta per jam.

Perbedaan pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan film yang terhitung baru dan peneliti memfokuskan pada penindasan perempuan yang dialami oleh karakter utama dari film Gadis Kretek yaitu Dasiyah. Beragam penelitian mengenai film umumnya

menggunakan analisis Semiotika untuk memahami signifikansi yang terdapat dalam sebuah film, namun peneliti menggunakan analisis Framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pendekatan dari Zhongdang Pan dan Kosicki ini menggunakan 4 tahapan untuk dapat menghasilkan hasil yang didapatkan di dalam sebuah film.

Film ini pun sangat penting untuk diteliti karena berpengaruh pada persepsi masyarakat. Film memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi dan pandangan masyarakat tentang konsep gender dan identitas. Contohnya pada film ini, film ini dapat menciptakan persepsi yang negatif atau sempit yang dapat memperkuat pemahaman yang salah atau keliru tentang perempuan dalam masyarakat meskipun contohnya ada pada dalam film. Film *Gadis Kretek 2023* juga menampilkan dinamika sosial dan gender sejarah Indonesia.

Latar belakang film ini, yang terjadi pada masa kolonial dan pascakolonial, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana norma-norma patriarki mempengaruhi kehidupan perempuan, terutama di rumah, publik dan masyarakat secara keseluruhan bahkan hingga saat ini. Film ini tidak hanya menunjukkan peran konvensional yang diberikan kepada perempuan, seperti mengurus rumah tangga dan tunduk pada kepemimpinan laki-laki. *Gadis Kretek* menggambarkan tekanan sosial yang dihadapi oleh perempuan melalui karakter-karakter perempuan yang kompleks, termasuk eksploitasi tenaga kerja, kontrol atas pilihan hidup, dan ekspektasi sosial yang mengikat mereka dalam peran-peran yang kaku.

Salah satu bentuk ekspresi budaya yang paling efektif adalah film, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana dinamika gender dalam masyarakat tercermin dan dikonstruksi melalui film. Film *Gadis Kretek 2023* memberikan perspektif yang kaya akan latar belakang sejarah Indonesia, terutama selama periode kolonial dan pascakolonial, ketika norma patriarki kuat dan membatasi peran dan kebebasan perempuan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan merujuk pada informasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana framing dengan menggunakan 4 struktur yaitu, struktur skrip,

struktur sintaksis, struktur tematik dan struktur retorik pada film Gadis Kretek (2023) digunakan untuk membangun representasi dalam penindasan perempuan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada latar belakang dan isu penelitian mengenai film Gadis Kretek dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis bentuk-bentuk dari penindasan terhadap perempuan dalam Film Gadis Kretek (2023).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai bentuk-bentuk penindasan kepada perempuan yang berkembang di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting pada kajian bidang gender dan media.
- c. Memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana penindasan terhadap perempuan dibangun dan dipertahankan dalam konten media khususnya pada film.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan temuan penelitian bisa digunakan dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak dari penindasan terhadap perempuan.
- b. Diharapkan temuan penelitian dapat menambah ilmu yang berkelanjutan untuk pengembangan ilmu komunikasi dan perbaikan praktik industri media.